

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 11 November 2024

Strategi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru

Wirdatul Zahidah Dela Lathifah A.R.¹, Zaili Rusli²

Universitas Riau, Indonesia

Email: wirdatul.zahidah5031@student.unri.ac.id¹, zaili.rusli@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru. Permasalahan permukiman kumuh di kota ini semakin mendesak akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang tidak terkendali. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif dengan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) guna mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penataan kawasan kumuh. penelitian ini menggunakan teori strategi pengembangan dari Richard Rumelt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang efektif meliputi penguatan peran pemerintah dan masyarakat, pengoptimalan penggunaan lahan, serta peningkatan akses infrastruktur dasar. Diharapkan dengan penerapan strategi ini, kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh dapat meningkat, serta tercipta lingkungan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan perencanaan kota secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kawasan permukiman kumuh di Pekanbaru.

Kata Kunci : Strategi Pengembangan, Permukiman Kumuh, Analisis SWOT.

Kata Kunci: strategi pengembangan, permukiman kumuh, analisis swot

Abstract

This research aims to analyze the development strategy and arrangement of slum areas in Pekanbaru City. The problem of slums in this city is increasingly urgent due to rapid population growth and uncontrolled urbanization. The research method includes a qualitative approach with a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis technique to identify internal and external factors that affect the arrangement of slum areas. This research uses the development strategies theory of Richard Rumelt. The results show that effective strategies include empowering the community and strengthening the role of Government, optimizing land use, and improving access to basic infrastructure. It is expected that with these strategies, the quality of life of people in slum areas can improve and create a habitable, sustainable, and integrated settlement environment with overall city planning. This research provides policy recommendations relevant to the local Government to overcome the problems of slum areas in Pekanbaru, emphasizing the importance of community involvement.

Keyword: development strategy, slums, swot analysis

PENDAHULUAN

Permukiman dan perumahan daerah-daerah di Indonesia mengalami penurunan kualitas lingkungan hunian, baik lingkungan perumahan dan permukiman yang di kota maupun desa (Wijaya et al., 2017). Banyak dijumpai pada kawasan permukiman yang padat, seperti lingkungan permukiman kumuh perkotaan. Penggunaan lahan secara optimal, wujud bangunan

yang tidak teratur, prasarana dan sarana lingkungan yang kurang memadai merupakan pertanda terjadinya penurunan tersebut (Sandy, 2021).

Wilayah perkotaan merupakan sebuah kawasan dengan tingkat pembangunan yang cukup tinggi dan jumlah penduduk yang cukup besar, salah satunya Kota Pekanbaru. Seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk semakin bertambah dan daerah ini menjadi tempat permukiman yang ramai dan padat penduduk. Perkotaan menjadi tempat tinggal lebih dari setengah populasi dunia, satu miliar di antaranya tinggal di permukiman informal, sering disebut sebagai daerah kumuh. Berikut data jumlah penduduk Kota Pekanbaru dari Tahun 2021-2023.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2021	994.585 Jiwa
2	2022	1.007.540 Jiwa
3	2023	1.123.348 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2023

Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas penduduk yang tinggi dan cepat, perlu untuk diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah terkait. Hal ini akan berdampak terhadap peningkatan kebutuhan akan kawasan hunian atau permukiman. Sehingga diperlukan penanganan kawasan permukiman yang terencana dan terpadu untuk memenuhi tingginya kebutuhan akan tempat tinggal masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Mewujudkan permukiman perkotaan menjadi layak huni harus diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana permukiman yang tepat (Ayat & Jonizar, 2020). Ketidakmampuan pemerintah dapat memicu terciptanya lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Masalah yang terjadi akibat adanya permukiman kumuh diantaranya adalah wajah perkotaan menjadi buruk dan kotor, penertiban bangunan sukar dijalankan, banjir, penyakit menular dan kebakaran sering melanda permukiman tersebut.

Perwujudan permukiman perkotaan menjadi layak huni dimulai dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang komprehensif dan kolaboratif (Wulan, 2020). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 106 ayat (3) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah penetapan lokasi (Risnawati, 2022).

Permukiman Kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Aguspriyanti et al., 2020). Seperti kondisi kekumuhan pada kawasan permukiman dinilai dari kondisi fisik prasarana dan sarana lingkungan. Seperti kondisi kekumuhan pada kawasan permukiman dinilai dari kondisi fisik prasarana dan sarana lingkungan.

Menurut Ramadhana & Pigawatib, (2014) faktor-faktor yang menyebabkan kawasan menjadi kumuh di antaranya adanya migrasi penduduk dari desa ke kota, urbanisasi, dan kombinasi urbanisasi dan migrasi sebagai akibat dari perpindahan konflik antar penduduk. Turok dan Borel-Saladin (2016) menyatakan bahwa di banyak negara, populasi kumuh yang sedang tumbuh ini mencerminkan pertumbuhan alami dan juga migrasi masuk. Pengaruh urbanisasi menjadi salah satu faktor penyebab kekumuhan.

Dengan isu masalah permukiman tersebut, bagaimana masyarakat dapat mengakses permukiman yang sehat, nyaman dan layak huni yang semestinya menjadi hak setiap warga

negara Indonesia. Ketika isu penyebab permukiman kumuh terus terjadi, masyarakat mengalami kondisi yang serba terbatas. Dan akibatnya warga yang mengalami hal tersebut akan kesulitan merubah keadaannya sendiri, dan tinggal di kawasan permukiman kumuh bukan atas kehendaknya.

Permukiman juga erat kaitannya dengan permukiman yang berada di lokasi dataran atau pusat kota, tepi air atau tepi sungai, rawan bencana dan topografi berbukit. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditinjau dari 7 (tujuh) indikator yaitu: bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum atau air bersih, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran (Arief et al., 2021).

Kelurahan Meranti Pandak yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Rumbai merupakan salah satu lokasi prioritas penanganan yang telah ditetapkan berdasarkan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Pekanbaru Tahun 2023. Dalam SK Walikota Pekanbaru Nomor 703 Tahun 2021 terkait Lokasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh, Kelurahan Meranti Pandak merupakan salah satu dari 15 Kelurahan yang termasuk kedalam kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Dalam praktiknya untuk menangani kawasan permukiman kumuh pada tingkat Kabupaten/Kota, pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk Kelompok Kerja (pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Pekanbaru. Dimana berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru Nomor 613 Tahun 2020 pokja PKP tersebut terdiri atas lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidang urusan terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kota Pekanbaru, salah satunya dalam melaksanakan pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh. Penanganan kawasan permukiman kumuh juga dapat dilaksanakan oleh pihak swasta serta masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh juga bisa menjadi aktor utama dalam menangani, mencegah sekaligus memelihara hasil pelaksanaan pembangunan di Kota Pekanbaru.

Namun dari intervensi tersebut masih menyisakan ruas kumuh di permukiman Kelurahan Meranti Pandak, sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji tentang apa saja faktor penghambat dalam pengembangan dan penataan di kelurahan meranti pandak serta merumuskan strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Meranti Pandak.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan juga penggunaan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori startegi pengembangan menurut Richard Rumelt (2011) yang memiliki tiga indikator yaitu diagnosis situasi (*Diagnosis of Situation*), panduan kebijakan (*Guiding Policy*) dan tindakan yang koheren (*Coherent Action*).

Manfaat dari penelitian ini antara lain 1) Manfaat akademis, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi mengenai strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru. 2) Manfaat praktis, yaitu memberikan masukan guna dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena atau kenyataan sosial dengan data yang dikumpulkan berdasarkan kata-kata dan tindakan dari informan (Mappasere & Suyuti, 2019). Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan

menggambarkan masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu popularisasi, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggali, mengumpulkan, dan mendeskripsikan informasi secara sistematis, faktual, dan akurat. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh kedalaman dari sebuah jawaban mengenai strategi penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Lokasi Penelitian



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru yang terletak di Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Jl. Abdul Rahman Hamid, Gedung B9 Lt.3 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Alasan dipilihnya Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman ini karena Disperkim merupakan pelaksana strategi penanganan kawasan permukiman kumuh serta peneliti dapat memperoleh lebih banyak informasi terkait penelitian.

Kemudian alasan dipilihnya lokasi Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai salah satu lokasi penelitian juga karena lokasi kawasan Kelurahan Meranti Pandak merupakan kawasan yang strategis dan mendukung rencana penanganan yang akan dilaksanakan.



Gambar 2. Peta Lokasi Kelurahan Meranti Pandak

Sumber : Earthstar Geographics, 2024

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini maka peneliti menetapkan informan sebagai sumber informasi dari pihak Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru. Informan sendiri adalah orang yang akan menjadi narasumber yang akan memberikan keterangan atau sebagai sumber informasi untuk dapat memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informan maka peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dimana metode ini informannya dipilih karena memiliki sebuah informasi yang akan berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2017). Kemudian insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel untuk memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Maka yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang Permukiman
2. Lurah Kelurahan Meranti Pandak
3. Staff Bidang Permukiman

Jenis dan Sumber Data

Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka data tersebut dilakukan dengan jalan percobaan ataupun melalui pengukuran gejala yang akan diteliti. Data yang dikumpulkan juga merupakan pernyataan mengenai fakta dan objek yang akan diteliti. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan Ibu Kepala Bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru serta staff pegawai contohnya pengamatan langsung berupa kondisi bangunan, sarana dan prasarana yang ada di lokasi penelitian. Sumber data ini diperoleh lokasi penelitian yaitu Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru serta Kelurahan Meranti Pandak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari instansi yang terkait dan juga diperoleh dari hasil kajian literatur yang berkaitan dengan judul pembahasan. Data sekunder diperoleh dari olahan atau sumber data kedua yaitu didapatkan dari penelitian terdahulu, jurnal, buku, internet, dan media massa untuk dapat menunjang kelengkapan dari penelitian ini. Data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini antara lain:

1. Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Meranti Pandak dapat diperoleh dari Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru.
2. Data kependudukan dapat diperoleh dari Kantor Kelurahan Meranti Pandak
3. Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 dapat diperoleh dari Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota Pekanbaru
4. Data kondisi fisik, sosial ekonomi masyarakat dapat diperoleh dari Kantor Kelurahan Meranti Pandak
5. Dokumen Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Pekanbaru tahun 2023 dapat diperoleh dari Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota Pekanbaru

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan berbagai teknik yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penggunaan metode pengumpulan data yang tepat sangat bergantung pada tujuan penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi dengan informan yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Miles & Huberman dalam buku Prof. Dr. A. Muri Yusuf (2014) menegaskan bahwa penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interview, observasi, kutipan, dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis

SWOT dengan pendekatan kualitatif, yang terdiri dari Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats. Analisis SWOT bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats).

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat kumpul data yaitu pedoman observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam analisis ini, permasalahan difokuskan pada aspek internal dan eksternal perusahaan dalam mengatasi permasalahannya. Sama seperti analisis lainnya, analisis SWOT perlu melalui beberapa tahap sebelum mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang diharapkan. Secara umum ada lima tahap yang harus dilalui dalam analisis SWOT, antara lain :

1. Pengumpulan Data, yaitu mengelompokkan data yang didapat dengan pengamatan, wawancara serta pengumpulan data mengandalkan sumber data sekunder untuk diproses.
2. Identifikasi Kategori, yaitu melakukan rekapitulasi data yang dilakukan untuk mengumpulkan kembali semua data yang sudah dicari dan memastikan apakah data yang ada sudah cukup atau masih kurang.
3. Matriks SWOT
4. Analisis Strategi, yaitu penelaahan empat faktor strategis secara bersamaan untuk menghasilkan strategi atau kebijakan yang disesuaikan dengan posisi dalam kuadran.
5. Penentuan Kebijakan, yaitu memberikan informasi dan alternatif kebijakan strategis yang dapat diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori strategi pengembangan menurut Richard Rumelt (2011) yaitu diagnosis situasi, panduan kebijakan (*guiding policy*) dan tindakan yang koheren (*coherent action*). Untuk mengetahui dan mengidentifikasi penelitian yang dilakukan penulis, berikut pembahasan lebih lanjut terkait strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

Strategi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru

Perwujudan permukiman perkotaan menjadi layak huni dimulai dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang komprehensif dan kolaboratif (Harun et al., 2022). Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman berpesan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dengan skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan yang bersifat menyeluruh (komprehensif), tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun juga mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (Pratama & Septiana, 2024). Dimana rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari 2 (dua) strategi, yaitu :

1. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, melalui pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali.

Kedua strategi tersebut dirumuskan setelah mempertimbangkan permasalahan yang ada seperti ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, persampahan, air limbah, air minum dan proteksi kebakaran). Lalu, untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru, peneliti menggunakan teori strategi pengembangan menurut Richard Rumelt yaitu diagnosis situasi, panduan kebijakan (*guiding policy*) dan tindakan yang koheren

(*coherent action*) dengan teknik wawancara langsung kepada informan. Berikut merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan untuk menggali informasi terkait strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

1. Diagnosis Situasi

Diagnosis situasi melibatkan identifikasi dan analisis masalah utama yang dihadapi. Banyak sekali strategi yang digunakan hanya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bukan hanya memutuskan apa yang harus dilakukan, tetapi masalah yang lebih mendasar yaitu memahami situasi. Diagnosis menamai atau mengklasifikasikan situasi, menghubungkan fakta ke dalam pola, dan menyarankan agar lebih banyak perhatian diberikan pada beberapa isu dan lebih sedikit pada isu lainnya. Diagnosis yang mendalam dapat mengubah pandangan seseorang terhadap situasi, sehingga menghasilkan perspektif yang sangat berbeda. Ketika diagnosis mengklasifikasikan situasi sebagai tipe tertentu, diagnosis tersebut membuka akses ke pengetahuan tentang bagaimana situasi yang serupa ditangani di masa lalu.

Dalam penelitian ini, permukiman kumuh di Kota Pekanbaru umumnya ditandai dengan infrastruktur dasar yang buruk dan tidak memadai, jalan-jalan di kawasan sering kali sempit, rusak dan tidak teraspal sehingga sulit untuk dilalui, sistem drainase yang buruk, banyak rumah yang dibangun dengan bahan bangunan seadanya dan tidak memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Lingkungan hidup di kawasan kumuh juga sangat terdegradasi dilihat dari banyaknya kawasan yang dipenuhi sampah karena kurangnya sistem pengelolaan sampah yang efektif.

Strategi dalam pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru juga telah mengalami evolusi sejak tahun 1999-2021. Dimana fokus utama yang awalnya adalah untuk mengatasi krisis ekonomi dengan meningkatkan kapasitas masyarakat bergeser pada penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas umum serta peningkatan kualitas pada penanganan kumuh dan pencegahan akan timbulnya kumuh baru.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu staff bidang permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru mengenai bagaimana Dinas menentukan area-area kumuh yang memerlukan tindakan segera yaitu sebagai berikut:

“Dinas menentukan area-area kumuh dengan melakukan survei yang penentuannya berdasarkan dokumen RP2KPKPK dengan beberapa syarat yaitu salah satunya harus terdapat banyak perumahan yang tidak layak huni dan perumahannya harus memusat agar terlihat saat pengerjaan dilakukan”.

(Wawancara dengan staff bidang permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru, April 2024)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam menentukan area-area kumuh yang memerlukan tindakan segera, Dinas melakukan survei atau observasi langsung yang idealnya dapat dikatakan sensus namun dengan skala yang lebih kecil ke masyarakat untuk mendata kebutuhan apa saja yang dibutuhkan kawasan tersebut sesuai dengan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Setelah melakukan survei maka Dinas dapat menentukan wilayah mana saja yang termasuk kedalam lingkup kawasan kumuh.

Penulis juga melakukan wawancara dengan staff bidang permukiman mengenai apa situasi dan masalah dalam pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh di salah satu Kelurahan, yaitu Kelurahan Meranti Pandak sebagai berikut:

“Program dalam pengembangan dan penataan kawasan permukiman sudah mulai dilaksanakan pada bulan juli namun masih bisa berubah-ubah, seperti pembangunan

fisik sesuai 7 (tujuh) indikator kriteria perumahan dan permukiman kumuh dan masalah atau penghambat yang dijumpai yaitu seperti saat mengkoordinasikan masyarakatnya”. (Wawancara dengan staff bidang permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru, April 2024)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Meranti Pandak sudah dilaksanakan dari bulan juli lalu dan masalah lain yang dihadapi selain sarana dan prasarana dan utilitas umum yaitu saat akan mengkoordinasikan masyarakat sekitar kawasan permukiman tersebut.

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan beberapa masalah yang dihadapi yaitu pertama penataan dan kondisi perumahan dan permukiman yang belum maksimal dikarenakan penataan tata letak pola kavling oleh masyarakat relatif tidak teratur. Kedua masih terdapat jalan rusak atau jalan tanah yang terkadang sulit untuk diakses. Ketiga penyediaan drainase belum maksimal dan kurang memadai. Selain itu, masalah juga berasal dari masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman tersebut. Setelah mengetahui situasi tersebut, penulis percaya bahwa strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru terus berkembang dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis data. Sehingga, memungkinkan pemerintah untuk menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran dan memahami situasi secara lebih mendalam dan terus mengevaluasi serta menyesuaikan kebutuhan berdasarkan data dan realitas di lapangan.

2. Panduan Kebijakan (*guiding policy*)

Kebijakan panduan ini menguraikan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi hambatan yang disorot oleh diagnosis. Kebijakan ini disebut “panduan” karena menyalurkan tindakan dalam arah tertentu tanpa mendefinisikan secara pasti apa yang harus dilakukan. Kebijakan yang baik bukanlah tujuan, visi, atau gambaran tentang hasil akhir yang diinginkan. Sebaliknya, kebijakan tersebut mendefinisikan metode untuk mengatasi situasi dan menyingkirkan berbagai kemungkinan tindakan.

Dalam penelitian ini, panduan kebijakan berperan sebagai kerangka utama yang memberikan arah dan dasar bagi seluruh upaya pengembangan dan penataan masalah permukiman kumuh. Dalam konteks Kota Pekanbaru, panduan kebijakan dimulai dengan Undang-Undang N0.1 Tahun 2011 sebagai landasan hukum yang menetapkan kerangka kerja untuk pembangunan permukiman. Kebijakan ini lalu diperluas dan disesuaikan dengan regulasi tambahan seperti Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02 Tahun 2016 yang memberikan panduan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Panduan kebijakan ini memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah koheren dan terkoordinasi, dengan fokus pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan pencegahan munculnya kawasan kumuh baru.

Penulis melakukan wawancara dengan staff bidang permukiman mengenai rencana tindakan yang dilakukan apakah sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

“Rencana tindakan yang dilakukan sama dengan yang dilakukan pada tahun sebelumnya hanya saja yang berbeda terdapat pada dana DAK tematik untuk pengentasan kawasan kumuh terpadu. Perencanaan juga sudah dilakukan dari tahun lalu dan setiap program memiliki ketentuan-ketentuan khusus tersendiri”.

(Wawancara dengan staff bidang permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru, April 2024)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa rencana tindakan yang dilakukan pada tahun ini masih sama dengan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan yang menjadi

perbedaannya hanyalah pada Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik yang baru dilakukan pada tahun ini. Selain itu, rencana tindakan ini juga mencakup mekanisme evaluasi dan umpan balik yang memungkinkan penyesuaian strategi berdasarkan hasil pemantauan lapangan.

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan analisis yaitu panduan kebijakan yang diterapkan di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh telah dirancang dengan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang ada, arahan strategis yang jelas, tindakan yang koheren, dan mekanisme umpan balik yang efektif. Strategi ini terus berkembang dengan penekanan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Panduan kebijakan ini memastikan tindakan yang diambil tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam mencegah munculnya kawasan kumuh baru. Kebijakan ini juga mendorong partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

3. Tindakan yang Koheren (*coherent action*)

Strategi adalah tentang tindakan, tentang melakukan sesuatu. Inti dari strategi harus mengandung tindakan (Fatimah, 2021). Menurut Widodo, (2021) strategi tidak perlu menunjukkan semua tindakan yang akan diambil saat peristiwa terjadi, tetapi harus ada kejelasan yang cukup tentang tindakan untuk mewujudkan konsep tersebut. Tindakan dalam inti strategi harus koheren. Artinya, penyebaran sumber daya, kebijakan, dan manuver yang dilakukan harus konsisten dan terkoordinasi.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah melaksanakan program-program perbaikan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, pembangunan dan perbaikan drainase, serta pengelolaan sampah yang lebih efektif. Selain itu, program peremajaan dan pembangunan kembali rumah-rumah yang tidak layak huni juga telah dilakukan. Untuk di sisi sosial, pemerintah melibatkan masyarakat melalui program pemberdayaan dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka.

Penulis melakukan wawancara dengan staff bidang permukiman mengenai tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas dalam pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh sebagai berikut:

“Tindakan yang dilakukan Dinas yaitu pertama sudah dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), kedua sebelum melakukan pembangunan, Dinas melakukan perencanaan dan survei terlebih dahulu sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14 Tahun 2018, dimana dilakukannya pembangunan fisik jalan lingkungan dan drainase lingkungan juga sudah sesuai dengan tupoksi dari Dinas”.

(Wawancara dengan staff bidang permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru, April 2024)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan Dinas terlihat jelas dalam upaya yang melibatkan perbaikan infrastruktur fisik, pemberdayaan sosial masyarakat, dan koordinasi kelembagaan. Tindakan-tindakan yang diambil juga tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah yang spesifik tetapi juga mendukung pencapaian jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup di kawasan permukiman kumuh.

Setiap program yang dilakukan dalam pengembangan dan penataan kawasan kumuh juga diawasi langsung oleh tenaga ahli yaitu Tenaga Fasilitator Lapangan yang sudah bekerja sama dengan Dinas. Penulis melakukan wawancara dengan staff bidang permukiman mengenai siapa yang melaksanakan koordinator dan pengawasan dari program dan kegiatanyang dilakukan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas bekerja sama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk mengkoordinasi kegiatan yang telah dilakukan dengan sistem pengawasan secara rutin setiap harinya sampai pelaksanaan program dan kegiatan selesai”.

(Wawancara dengan staff bidang permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru, April 2024)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa program dan kegiatan yang dilakukan Dinas diawasi secara ketat oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Dimana TFL berperan penting dalam memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan (Alfiyaturohmaniyah et al., 2023). Mereka melakukan monitoring secara berkala, mengevaluasi kemajuan fisik pembangunan serta memberikan bimbingan teknis.

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru telah mengimplementasikan strategi yang terstruktur dan koheren. Setiap tindakan yang diambil juga merupakan langkah-langkah yang telah terkoordinasi dan terpadu, serta mengarahkan Kota menuju tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan permukiman kumuh. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu intervensi fisik, pengawasan dan pengendalian, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan melalui pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali setelah mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, persampahan, air limbah, air minum dan proteksi kebakaran).

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah teknik analisis yang berfokus pada faktor-faktor yang mengancam sebuah perusahaan secara menyeluruh (Jannah et al., 2024). Faktor-faktor kunci tersebut dibagi menjadi empat kategori utama yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) (Dj, 2017). Dalam analisis ini, permasalahan difokuskan pada aspek internal dan eksternal, serta seperti analisis lainnya, analisis SWOT perlu melalui beberapa tahap sebelum mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang diharapkan. Secara umum ada lima tahap yang harus dilalui, antara lain pengumpulan data, identifikasi kategori, matriks SWOT, analisis strategi dan penentuan kebijakan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini disesuaikan dengan metode analisis yang dilakukan. Jika menggunakan metode pendekatan kualitatif bisa dilakukan dengan pengamatan maupun wawancara serta pengumpulan data dengan mengandalkan sumber data sekunder. Tahap awal pengumpulan data bisa dimulai dari pengumpulan identitas. Setelah itu, baru bisa menentukan pendekatan seperti apa yang diperlukan dalam memecahkan masalah yang ada. Setelah mendapatkan informasi barulah menuju tahap selanjutnya dimana masing-masing komponen dipecah berdasarkan kategori internal atau eksternal.

Susanti, (2023) menyatakan bahwa analisis internal lebih familiar dikenal dengan Analisis Faktor Strategi Internal (*internal strategic factors analysis summary* atau IFAS). Sementara analisis eksternal, sering disebut dengan Analisis Faktor Strategi Eksternal (*external strategic factors analysis summary* atau EFAS). Penulis menentukan terlebih dahulu kemungkinan kekuatan dan kelemahan berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Berikut data sesuai dengan faktor analisis pada pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh:

Tabel 2. Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal	
No.	Kekuatan
1	Komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menangani kawasan kumuh
2	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kumuh tinggi
3	Anggaran bidang infrastruktur besar
4	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)
5	Sudah terdapat program pemerintah dalam pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh diantaranya pembuatan jalan lingkungan, drainase dan rumah layak huni
6	Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi sudah memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
No	Kelemahan
1	Kebutuhan ruang terbuka yang belum memenuhi standar
2	Kelurahan Meranti Pandak termasuk kedalam kategori kumuh ringan
3	Pengetahuan dan kesadaran masyarakat kurang tentang kesehatan lingkungan
4	Pengetahuan dan kesadaran masyarakat kurang tentang tata ruang kota
5	Sarana dan prasarana permukiman yang masih rendah
Faktor Eksternal	
No.	Peluang
1	Alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan kawasan kumuh cukup besar
2	Program (100-0-100) target zero kumuh
3	Berpotensi sebagai kawasan pariwisata
No	Ancaman
1	Adanya penambahan volume sampah dari wilayah sekitar
2	Penurunan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman kumuh

Sumber: hasil penelitian, 2024

2. Identifikasi Kategori

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah melakukan rekapitulasi data. Perekap dilakukan untuk mengumpulkan kembali semua data yang sudah dicari. Selain itu, rekap dilakukan untuk memastikan apakah data yang ada sudah cukup atau masih kurang. Faktor-faktor pengaruh untuk kekuatan dan kelemahan di tata dalam urutan tersendiri. Nilai bobot untuk setiap faktor harus disesuaikan dengan kemungkinan pengaruhnya. Nilainya berkisar antara 0-1. Angka 0 bernilai “Sangat Tidak Berpengaruh”, angka satu bernilai “Sangat Berpengaruh”. Semakin besar pengaruh faktor tersebut terhadap kategori maka nilai bobotnya akan semakin besar.

Tabel 3. Tabel Analisis IFAS

Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS)				
No	Kekuatan (Strength)	Bobot (a)	Rating (b)	Total (axb)
1.	Komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menangani kawasan kumuh	0.18	4	0,72

2	Dukungan masyarakat terhadap penanganan kumuh tinggi	0.14	3	0.42
3	Anggaran bidang infrastruktur besar	0.15	4	0.6
4	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)	0.12	3	0.36
5	Sudah terdapat program pemerintah dalam pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh diantaranya pembuatan jalan lingkungan, drainase dan rumah layak huni	0.16	3	0.48
6	Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi sudah memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	0.12	3	0.36
Jumlah Kekuatan		0.87	20	2,94
No. Kelemahan (Weakness)				
1	Kebutuhan ruang terbuka yang belum memenuhi standar	0.14	2	0.4
2	Kelurahan Meranti Pandak termasuk kedalam kategori kumuh ringan	0.15	3	0.6
3	Pengetahuan dan kesadaran masyarakat kurang tentang kesehatan lingkungan	0.12	2	0.3
4	Pengetahuan dan kesadaran masyarakat kurang tentang tata ruang kota	0.12	2	0.3
5	Sarana dan prasarana permukiman yang masih rendah	0.15	3	0.54
Jumlah Kelemahan		0,68	12	2.14
Jumlah Keseluruhan		1,55	32	5.08

Sumber: olahan peneliti,2024

Nilai total bobot kekuatan sebagai bagian positif dari analisis IFAS haruslah lebih besar, daripada nilai bobot kelemahan yang merupakan bagian negatif dari analisis IFAS. Total nilai bobot IFAS (kekuatan ditambah kelemahan), haruslah bernilai ± 1 atau $\pm 100\%$. Tergantung satuan yang digunakan.

Tabel 4. Tabel Analisis EFAS

Faktor-Faktir Strategi Eksternal (EFAS)					
No	Peluang (Opportunity)	Bobot (a)	Rating (b)	Total (axb)	
1	Alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan kawasan kumuh cukup besar	0.15	4	0.84	
2	Program (100-0-100) target zero kumuh	0.14	3	0.45	
3	Berpotensi sebagai kawasan pariwisata	0.17	3	0.6	
Jumlah Kekuatan		0,46	10	1.89	
No	Ancaman (Threat)	Bobot (a)	Rating (b)	Total (axb)	
1	Adanya penambahan volume sampah dari wilayah sekitar	0.14	3	0.42	
2	Penurunan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman kumuh	0.15	3	0.45	
Jumlah Kelemahan		0,29	6	0.87	
Jumlah Keseluruhan		0,75	16	2,76	

Sumber: olahan peneliti, 2024

Nilai total bobot peluang sebagai bagian positif dari analisis EFAS haruslah lebih besar daripada nilai total bobot ancaman, yang merupakan bagian negatif dari analisis EFAS. Total nilai bobot EFAS (peluang ditambah ancaman) haruslah bernilai ± 1 atau $\pm 100\%$. Tergantung satuan yang digunakan.

3. Matriks SWOT

Tahap selanjutnya dalam analisis SWOT adalah penyusunan matriks. Bisa dibilang matriks adalah apa yang membentuk SWOT. Matriks SWOT menjadi bagian utama dalam analisis SWOT. Keberadaannya menjadi kunci dalam pengelompokan setiap faktor, baik dalam IFAS maupun EFAS agar bisa mendapatkan solusi terbaik pada setiap permasalahan. Matriks SWOT pada hakikatnya adalah alat yang dipakai dalam menyusun faktor-faktor strategis perusahaan. Dibawah ini tabel 5. Matriks SWOT sebagai berikut:

Tabel 5. Matriks SWOT

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
1. Komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menangani kawasan kumuh	1. Kebutuhan ruang terbuka yang belum memenuhi standar
2. Dukungan masyarakat terhadap	2. Kelurahan Meranti Pandak termasuk

	proses penanganan kumuh tinggi	kedalam kategori kumuh ringan
	3. Anggaran bidang infrastruktur besar	3. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat kurang tentang kesehatan lingkungan
IFAS	4. Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)	4. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat kurang tentang tata ruang kota
	5. Sudah terdapat program pemerintah dalam pengembangan dan penataan kawasan permukiman kumuh diantaranya pembuatan jalan lingkungan, drainase dan rumah layak huni	5. Sarana dan prasarana permukiman yang masih rendah
EFAS	6. Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi sudah memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	

Peluang (Opportunity)	Strategi S-O	Strategi W-O
1. Alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan kawasan kumuh cukup besar	1. Penguatan dan perluasan program pemerintah dalam penataan kawasan kumuh dengan memanfaatkan anggaran besar dari pemerintah daerah dan pusat serta program 100-0-100 (zero kumuh). Komitmen pemerintah dan dukungan masyarakat yang kuat menjadi pendorong utama keberhasilan program ini.	1. Program peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan lingkungan dan tata ruang dengan memanfaatkan dukungan dan alokasi anggaran pemerintah untuk penanganan kawasan kumuh. Program ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang terfokus
2. Program (100-0-100) target zero kumuh		2. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman di Kelurahan Meranti
3. Berpotensi sebagai kawasan pariwisata	2. Pengembangan kawasan kumuh	

	menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan dengan dukungan dari peogram pemerintah dan kepastian status tanah. Dengan pengelolaan yang baik, kawasan ini bisa dijadikan model pengembangan pariwisata perkotaan yang memperbaiki kualitas lingkungan	Pandak melalui pemanfaatan anggaran pusat dan daerah serta program 100-0-100. Dengan ini, standar minimal sarana seperti ruang terbuka dan fasilitas permukiman dapat terpenuhi
Ancaman (Threats)	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Adanya penambahan volume sampah dari wilayah sekitar	1. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan memanfaatkan komitmen kuat pemerintah dan dukungan masyarakat yang tinggi, guna mencegah penurunan kualitas lingkungan akibat peningkatan volume sampah	1. Revitalisasi ruang terbuka dan peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat guna mengurangi penurunan kualitas lingkungan. Ini penting dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait pentingnya tata ruang dan kesehatan lingkungan
2. Penurunan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman kumuh	2. Pengembangan sistem drainase yang lebih baik dan terintegrasi dengan infrastruktur lainnya, dengan menggunakan anggaran besar yang tersedia untuk mencegah degradasi lingkungan dan penurunan kualitas kawasan	2. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana permukiman untuk mencegah semakin memburuknya kondisi kumuh akibat penambahan sampah dan degradasi lingkungan, terutama di kawasan yang masuk kategori kumuh ringan seperti Kelurahan Meranti Pandak

Sumber: olahan peneliti, 2024

4. Analisis Strategi

Pada tahap ini kita telah sampai dalam analisis mendalam dalam SWOT. Analisis dilakukan dengan penelaahan empat faktor strategis secara bersamaan. Pemecahan masalah dalam SWOT dilihat dari bagaimana pengaruh sebuah faktor strategis terhadap faktor strategis lainnya (Mugirotin et al., 2022). Pengaruh tersebut berasal dari kombinasi antara setiap faktor IFAS dan EFAS secara bersandingan. Setiap kombinasi akan menghasilkan strategi atau kebijakan perusahaan yang berbeda. Dalam menentukan strategi kebijakan kita harus memahami kebijakan strategi seperti apa yang dibutuhkan. Kriteria seperti itu bisa ditentukan dengan perhitungan kuadran SWOT.

Karakteristik kebijakan yang perlu diambil dalam analisis SWOT, disesuaikan dengan posisi di dalam kuadran. Pada setiap kuadran, karakteristik kebijakan yang diambil bisa berbeda. Pada tahap sebelumnya, penulis telah melakukan perekapan data survei yang membantu penulis menganalisis komponen SWOT. Penulis juga telah melakukan perhitungan bobot dan rating masing-masing untuk IFAS dan EFAS. Selanjutnya, dengan kedua data tersebut penulis akan menentukan nilai pada kuadran SWOT.

Tabel 6. Data Rekapitan Komponen SWOT

Analisis Kuadran SWOT				
No	Komponen	Total Bobot (a)	Total Rating (b)	Total Akhir (axb)
1	Kekuatan (Strength)	0,87	20	2,94
2	Kelemahan (Weakness)	0,68	12	2,14
3	Peluang (Opportunity)	0,46	10	1,89
4	Ancaman (Threats)	0,29	6	0,87

Sumber: Olahan Penulis, 2024

Untuk penentuan kuadran, perlu untuk membandingkan nilai total akhir dari masing-masing komponen SWOT. Hasil perbandingannya nanti digunakan untuk menentukan koordinat dalam kuadran SWOT, rumus yang dipakai dalam penentuan kuadran pada data yang ada di tabel 5.5, sebagai berikut serta persamaannya menjadi :

1. Koordinat analisis internal (sumbu X) = total nilai kekuatan (S) – total nilai kelemahan (W)
 $2,94 - 2,14 = 0,8$
2. Koordinat analisis eksternal (sumbu Y) = total nilai peluang (O) – total nilai ancaman (T)
 $1,89 - 0,87 = 1,02$

Setelah mendapatkan kedua nilai koordinat, tahap selanjutnya adalah menentukan posisi pertemuan koordinat tersebut. Berdasarkan koordinat internal (0.8) dan eksternal (1.02), posisinya cenderung ke kuadran I (*Growth-Oriented Strategy*). Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang harus diterapkan lebih berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal secara maksimal. Strategi yang sesuai di kuadran ini adalah agresif, yaitu memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

5. Penentuan Kebijakan

Tahap akhir dalam analisis SWOT adalah penentuan kebijakan. Penentuan arah kebijakan menjadi sangat penting, terutama ketika harus menentukan skala prioritasnya. Analisis SWOT bermanfaat dalam proses analisis strategi kebijakan. Bukan hanya memberikan informasi yang diperlukan mengenai masalah yang ada, tetapi juga mampu memberikan alternatif kebijakan strategis yang bisa diambil. Kebijakan strategis dalam analisis SWOT, pada dasarnya merupakan penyesuaian kondisi pada setiap kemungkinan permasalahan. Pada tabel 5.4 bisa dilihat bahwa setiap faktor permasalahan ada pada kolomnya masing-masing. Dengan membandingkan setiap komponen satu persatu, penulis bisa menentukan kebijakan strategis yang baik. Dengan menggabungkan anjuran strategi pertumbuhan agresif (*Growth Oriented*

Strategy) dari analisis kuadran SWOT, penulis bisa menentukan hasil strategi kebijakan seperti dibawah ini :

1. Kebijakan strategi S-O
 - a. Optimalisasi anggaran dan program pemerintah
 - b. Pengembangan pariwisata berbasis lingkungan
2. Kebijakan strategi W-O
 - a. Pendidikan dan sosialisasi tentang tata ruang dan kesehatan lingkungan
 - b. Revitalisasi ruang terbuka dan sarana prasarana
3. Kebijakan strategi S-T
 - a. Pengelolaan sampah yang efisien
 - b. Peningkatan kualitas lingkungan dengan legalitas tanah yang jelas
4. Kebijakan strategi W-T
 - a. Revitalisasi ruang terbuka untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mencegah penurunan lingkungan

Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah kawasan permukiman kumuh saja, tetapi juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui optimalisasi sumber daya dan potensi yang ada. Strategi kebijakan yang diusulkan akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kawasan permukiman yang lebih layak huni, ramah lingkungan, serta memiliki daya saing tinggi.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan yaitu strategi yang diterapkan adalah revitalisasi dan kolaborasi dengan pihak swasta, seperti optimalisasi anggaran pemerintah, pengelolaan lingkungan yang lebih efisien dan revitalisasi ruang terbuka serta infrastruktur. Dimana, untuk meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan atau objek yang direvitalisasi baik dari segi ekonomi, fisik, maupun sosial dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks kawasan permukiman kumuh, revitalisasi mencakup perbaikan infrastruktur, tata ruang, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, layak huni, dan produktif bagi masyarakat setempat. Strategi ini dalam kawasan permukiman kumuh dapat mengalami perubahan yang signifikan dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wilayah ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur dasar yang buruk dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Meskipun demikian, pemerintah Kota Pekanbaru telah mengambil langkah-langkah positif, seperti pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, dengan pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Analisis SWOT mengindikasikan bahwa Pekanbaru memiliki potensi besar dalam menangani masalah kawasan kumuh, didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, meskipun tantangan seperti peningkatan volume sampah dan penurunan kualitas lingkungan masih perlu menjadi fokus perhatian..

DAFTAR PUSTAKA

- Aguspriyanti, C. D., Nimita, F., & Deviana, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan Di Permukiman Pesisir Kampung Tua Tanjung Riau. *Journal of Architectural Design and Development (JAD)*, 1(2), 176–186.
- Alfiyaturohmaniyah, S., Warsiyah, W., & Muflihin, A. (2023). Strategies of Islamic Schools

- in Preparing for Accreditation A (Case Study of Muhammadiyah 05 Elementary School in Semarang). *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 6(2), 130–143.
- Arief, A. S., Redin, H., & Amelia, V. (2021). Tingkat kekumuhan dan pola penanganan kawasan permukiman Murjani Bawah di Kota Palangka Raya. *Journal of Environment and Management*, 2(1), 71–81.
- Ayat, M., & Jonizar, J. (2020). Konsep Pembangunan Permukiman Berwawasan Lingkungan. *Bearing: Jurnal Penelitian Dan Kajian Teknik Sipil*, 6(2), 86–96.
- Dj, Y. R. (2017). Penerapan Strategi Segmentasi Pasar Dan Positioning Produk Dengan Pendekatan Analisis Swot Untuk Peningkatan Penjualan Pada Ud. Surya Gemilang Motor Di Surabaya. *Jurnal Ekbis*, 17(1), 13-Halaman.
- Fatimah, I. F. (2021). Strategi inovasi kurikulum. *EduTeach: Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran*, 2(1), 16–30.
- Harun, M., Kustiani, I., & Nama, G. F. (2022). Capaian Program KOTAKU dalam Penanganan Kumuh di Kelurahan Hadimulyo Barat dan Hadimulyo Timur. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 2(2).
- Jannah, M., Faizah, A. N., Indraputri, A. J., Puspita, V. E., Hidayat, R., & Ikaningtyas, M. (2024). Pentingnya Analisis Swot dalam Suatu Perencanaan dan Pengembangan Bisnis. *IJESPG (International Journal of Engineering, Economic, Social Politic and Government)*, 2(2), 9–17.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Mugirotin, M., Yuliana, Y., Astuty, D., Datulayuk, S., & Mulawarman, W. G. (2022). Implementasi Model Analisis SWOT pada Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Samarinda. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 2(1), 15–22.
- Pratama, N., & Septiana, T. (2024). Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kabupaten Musi Rawas Utara. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 4(1).
- Ramadhana, R. A., & Pigawatib, B. (2014). *Pemanfaatan Penginderaan Jauh Untuk Identifikasi Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Perkotaan*.
- Risnawati, K. (2022). Analisis Konsep Pencegahan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Soppeng. *Jurnal Al-Ḥadīrah Al-Islāmiyah*, 2(2), 28–52.
- Rumelt, R. (2011). The perils of bad strategy. *McKinsey Quarterly*, 1(3), 1–10.
- Sandy, R. (2021). *Identifikasi Pemukiman Kumuh dan Strategi Penanganannya Pada Pemukiman Di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, E. D. (2023). Analisis Strategi Pemasaran Menggunakan Matriks SWOT Dalam Meningkatkan Jumlah Pengguna pada Aplikasi Halodoc di Masa Pandemi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1663–1673.
- Turok, I., & Borel-Saladin, J. (2016). Backyard shacks, informality and the urban housing crisis in South Africa: stopgap or prototype solution? *Housing Studies*, 31(4), 384–409.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Wijaya, K., Permana, A. Y., & Swanto, N. (2017). Kawasan Bantaran Sungai Cikapundung Sebagai Pemukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kota Bandung.

Arcade, 1(2), 57–68.

Wulan, N. D. N. (2020). Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(2), 84–98.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.